

**PROSES KOLABORASI PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG
COLLABORATIVE GOVERNANCE
(Studi Pada Kebun Wak Inggı Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten
Pasuruan Provinsi Jawa Timur)**

Nadhifa Tri Rahmadina¹, Yaqub Cikusin², Didik Supriyanto³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl
MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia
Email: nadhifarahmadina@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan pengembangan pariwisata pedesaan yang berkelanjutan sangat bergantung pada sinergi berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi collaborative governance pada Kebun Wak Inggı sebagai upaya mewujudkan potensi wisata desa. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengkaji interaksi antara pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, dan warga setempat. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi, yang kemudian diolah menggunakan teknik kondensasi dan penyajian data model Miles dan Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka kolaborasi telah terbentuk melalui komunikasi aktif dan pembagian tugas antar-aktor dalam mengelola potensi wisata desa. Namun, efektivitas kerja sama ini belum mencapai titik optimal. Peneliti menemukan beberapa hambatan krusial, seperti partisipasi publik yang masih tersegmentasi, keterbatasan akses sumber daya fisik maupun finansial, serta koordinasi antarlembaga yang belum sinkron secara menyeluruh. Kendala-kendala tersebut menyebabkan visi pariwisata berkelanjutan belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Sebagai simpulan, meskipun fondasi collaborative governance sudah diletakkan, diperlukan penguatan signifikan pada aspek keterlibatan masyarakat luas dan integrasi antar-aktor. Dukungan sumber daya yang memadai serta perbaikan sistem koordinasi menjadi prasyarat mutlak agar pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kebun Wak Inggı dapat berjalan secara mandiri dan memberikan dampak ekonomi yang langgeng bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Pemerintah Desa; Kolaborasi; Wisata Desa; Kebun Wak Inggı; Ansell dan Gash

Pendahuluan

Pariwisata desa merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Pengembangan desa wisata tidak hanya memerlukan peran pemerintah, tetapi juga keterlibatan masyarakat serta berbagai pihak terkait dalam suatu proses kolaborasi.

Konsep *collaborative governance* menjadi pendekatan penting dalam pengelolaan sektor publik, khususnya dalam peningkatan potensi wisata berbasis masyarakat. *Collaborative governance* menekankan pada proses kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik.

Desa Wisata Kebun Wak Inggı merupakan salah satu potensi wisata yang berkembang dengan memanfaatkan potensi alam dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan wisata ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), karang taruna, serta masyarakat lokal. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Tetapi dalam praktiknya, proses kolaborasi tersebut tidak selalu terlaksana dengan optimal. Masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar pihak yang belum optimal, serta keterlibatan masyarakat yang belum merata. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara mendalam proses kolaborasi pemerintah desa dalam mendorong *collaborative governance* pada pengelolaan kebun desa di Desa Wisata Kebun Wak Inggı serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses kolaborasi pemerintah desa dalam mendorong *collaborative governance* pada Kebun Wak Inggi sebagai studi kasus di Desa Parerejo, Kabupaten Pasuruan.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada proses kolaborasi pemerintah desa dalam mendorong *collaborative governance* di Kebun Wak Inggi Desa Parerejo, Kabupaten Pasuruan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan mengenai proses kolaborasi pemerintah desa dalam mendorong *collaborative governance* pada pengelolaan Kebun Wak Inggi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti lain dalam kajian administrasi publik, khususnya terkait kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya pedesaan serta pengembangan literatur akademik di universitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan penerapan *collaborative governance* pada pengelolaan sumber daya desa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi sehingga dapat meningkatkan partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan sumber daya untuk kesejahteraan bersama.

Tinjauan Pustaka

Konsep Collaborative Governance

Konsep *collaborative governance* berkembang melalui kontribusi berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu politik, administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi, dan ekonomi. Karakter interdisipliner tersebut menyebabkan munculnya beragam definisi yang menyesuaikan dengan perspektif teoritis masing-masing bidang (Emerson et al., 2012; Williams, 2012) dalam Noor et al. (2022). Secara umum, *collaborative governance* dipahami sebagai suatu pendekatan tata kelola pemerintahan yang mengikutsertakan partisipasi aktif para pemangku kepentingan di luar aktor negara.

Menurut Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan mekanisme pengaturan di mana instansi pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta atau masyarakat dalam sebuah forum formal. Fokus utama dari model ini adalah dialog deliberatif untuk mencapai kesepakatan kolektif dalam merancang dan menjalankan kebijakan publik. Hal ini dilakukan demi memastikan pengelolaan aset dan program negara melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Melalui mekanisme ini, pengambilan keputusan tidak lagi bersifat sepihak, melainkan dilakukan melalui forum resmi yang mempertemukan berbagai pihak untuk bermusyawarah dan mencapai kesepakatan bersama.

Model Kerangka Kerja Collaborative Governance

Secara konseptual, model kerangka *collaborative governance* dipahami sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan publik. Ansell dan Gash melalui artikelnya *Collaborative Governance in Theory and Practice* mengembangkan model tersebut berdasarkan telaah literatur yang komprehensif. Hasil kajian tersebut memetakan empat variabel utama sebagai elemen pembentuk model *collaborative governance*, yaitu: 1) *starting condition* (kondisi awal); 2) *facilitative leadership* (kepemimpinan); 3) *institutional design* (desain kelembagaan), dan 4) *collaborative process* (proses kolaboratif) (Ansell & Gash, 2007).

Gambar 1. Model Kerangka Kerja Collaborative Governance



1) Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Kondisi awal merupakan faktor yang memengaruhi sebelum proses kolaborasi berlangsung. Pada tahap ini terdapat situasi yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat terjalannya kerja sama, baik antar pemangku kepentingan maupun antara lembaga dengan para pemangku kepentingan. Ansell dan Gash (2007) mengidentifikasi tiga variabel krusial dalam kondisi awal kolaborasi. Pertama, adanya aspek kesenjangan di antara pemangku kepentingan yang mencakup ketimpangan kekuasaan, perbedaan ketersediaan sumber daya, serta ketidaksetaraan pengetahuan. Kedua, faktor historis yang melibatkan rekam jejak hubungan masa lalu, baik berupa kerja sama yang harmonis maupun konflik yang pernah terjadi. Ketiga, adanya faktor pendorong serta hambatan yang memengaruhi kesediaan tiap aktor untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi tersebut.

2) Kepemimpinan (*Facilitative Leadership*)

Dalam proses kolaborasi, menurut Ansell & Gash (2007) potensi terjadinya konflik atau perselisihan serta tingginya tingkat ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat mungkin muncul. Namun demikian, di sisi lain sering kali terdapat keinginan yang kuat dari para pihak untuk tetap berpartisipasi dalam proses kolaboratif. Pada kondisi tersebut, diperlukan kepemimpinan yang mampu diterima dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan serta berperan sebagai mediator dalam menjembatani perbedaan. Kepemimpinan yang kuat yakni yang memperoleh penghormatan dan kepercayaan dari seluruh aktor menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kolaborasi. Kehadiran pemimpin yang kredibel akan meningkatkan peluang tercapainya tujuan bersama. Umumnya, kepemimpinan semacam ini tumbuh dari komunitas pemangku kepentingan itu sendiri.

3) Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Menurut Ansell dan Gash (2007), desain kelembagaan merupakan kerangka aturan dasar yang mengelola jalannya proses kolaborasi. Elemen ini sangat krusial karena berperan sebagai pemberi legitimasi prosedural, yang memastikan bahwa seluruh tahapan kerja sama memiliki landasan hukum dan tata cara yang sah serta diakui oleh semua pihak yang terlibat. Penekanan utama dalam desain kelembagaan terletak pada kejelasan aturan main terkait partisipasi para aktor, pembentukan forum kolaboratif, serta penyusunan ketentuan pelaksanaan yang terstruktur dan transparan serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

4) Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Berdasarkan model yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2007), proses kolaborasi berlangsung dalam bentuk siklus dinamis yang melibatkan berbagai komponen utama yang saling memengaruhi. Proses ini dikenal sebagai *Collaborative Decision-Making Cycle*, yang terdiri dari beberapa tahapan berikut:

a. Dialog Tatap Muka

Komunikasi terbuka menjadi kunci utama dalam menciptakan kolaborasi yang efektif. Melalui dialog langsung antaraktor, dapat terbentuk pemahaman dan kesepahaman yang menjadi dasar terciptanya konsensus bersama. Komunikasi yang intensif juga mendorong transparansi dan memperkuat kepercayaan antar pihak.

b. Membangun Kepercayaan

Dalam konteks kolaborasi, kepercayaan memegang peranan yang sangat penting dalam mempertahankan kerja sama jangka panjang. Proses membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan komitmen berkelanjutan dari setiap aktor yang terlibat. Hubungan yang dilandasi rasa saling percaya akan memperkuat stabilitas kolaborasi dan meminimalkan potensi konflik.

c. Komitmen terhadap Proses

Komitmen merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu kolaborasi. Setiap aktor yang terlibat perlu memiliki rasa tanggung jawab serta rasa memiliki terhadap proses dan tujuan yang hendak dicapai. Komitmen yang kuat dapat tumbuh apabila terdapat saling pengakuan (*mutual recognition*) dan penghargaan (*joint appreciation*) antaraktor terhadap kontribusi masing-masing pihak.

d. Pemahaman Bersama

Kolaborasi yang efektif hanya dapat terwujud apabila semua pihak memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan. Pemahaman bersama mencakup kesepakatan terhadap permasalahan yang dihadapi serta strategi untuk mencapai tujuan bersama. Kesamaan pandangan ini mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat sinergi antaraktor.

e. Dampak Sementara

Selama proses kolaborasi, seringkali muncul pencapaian sementara yang dikenal sebagai *small wins* atau kemenangan kecil. Dampak sementara ini berfungsi sebagai umpan balik positif (*feedback*) untuk menjaga semangat kolaborasi dan memastikan seluruh pihak tetap berada pada arah tujuan yang sama.

Ansell dan Gash (2007) menekankan bahwa keberhasilan sebuah kolaborasi tidak semata-mata diukur dari pencapaian akhir. Sebaliknya, model ini menitikberatkan pada aspek relasional, di mana kualitas interaksi, tingkat kepercayaan, serta konsistensi komitmen yang dikembangkan selama proses berlangsung menjadi indikator utama keberhasilan kerja sama tersebut.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam terkait proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata desa.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditetapkan agar penelitian memiliki batasan yang jelas namun tetap memungkinkan penyesuaian di lapangan. Sugiyono (2013) menegaskan dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung tergantung pada kondisi di lapangan.

Fokus ini mencakup:

1. Proses Kolaborasi Pemerintah Desa dalam Mendorong *Collaborative Governance* pada Pengelolaan Kebun Wak Inggi

Adapun beberapa tahapan pada proses kolaboratif, proses ini dikenal sebagai *Collaborative Decision-Making Cycle*, yang terdiri dari beberapa tahap berikut:

- a. Dialog Tatap Muka
- b. Membangun Kepercayaan
- c. Komitmen terhadap Proses
- d. Pemahaman Bersama
- e. Dampak Sementara

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan *Collaborative Governance* pada Pengelolaan Kebun Wak Inggi

Fokus ini menjelaskan faktor-faktor yang memperlancar maupun menghambat proses kolaborasi pada pengelolaan Kebun Wak Inggi, mencakup:

- a. Faktor Pendukung
- b. Faktor Penghambat

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013), teknik pengumpulan data menempati posisi paling krusial dalam sebuah riset karena berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan utama, yaitu perolehan informasi yang akurat. Dalam konteks kualitatif, proses ini dilaksanakan pada kondisi alamiah (natural setting) dengan mengandalkan sumber data primer. Peneliti menerapkan kombinasi teknik berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi secara berkesinambungan. Proses pencarian data ini hanya akan dihentikan apabila informasi yang terkumpul telah mencapai tahap saturasi atau titik jenuh.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2013), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek di lapangan.

Hasil observasi meliputi:

- a. Aktivitas pemerintah desa dalam mendukung dan mengoordinasikan pengelolaan kebun.
- b. Pola interaksi antaraktor dalam proses *collaborative governance*.
- c. Kondisi fisik kebun dan aktivitas masyarakat.
- d. Bentuk partisipasi dalam pengelolaan kebun.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013), wawancara merupakan perolehan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi yang mendalam. Dalam penelitian ini, in-depth interview digunakan untuk menggali data secara komprehensif dari informan terkait peran pemerintah desa serta bentuk kolaborasi yang terjalin antaraktor.

Wawancara ini dilakukan pada:

- a. Kepala desa atau perangkat desa
- b. Pengelola Kebun Wak Inggi
- c. Masyarakat
- d. Informan pendukung lainnya

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013, hal. 124), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan, arsip, foto, atau dokumen lain terkait objek penelitian.

Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi:

- a. Foto kegiatan kolaborasi di Kebun Wak Inggi,
- b. Dokumen desa terkait program pemberdayaan,

- c. Foto interaksi pemerintah desa dengan pengelola kebun,
- d. Arsip atau laporan kegiatan kebun,
- e. Foto kondisi fisik kebun,

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada penelitian ini menggunakan Model Analisis Interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), sebagaimana dijelaskan dalam buku *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Model ini memandang analisis data sebagai proses berulang (*cyclical*) dan saling berkaitan, di mana analisis tidak hanya dilakukan setelah data terkumpul, tetapi dimulai sejak tahap pra-lapangan, selama proses pengumpulan data, hingga laporan akhir penelitian selesai ditulis. Dalam model tersebut, pengumpulan data (*Data Collection*) ditampilkan sebagai bagian yang berinteraksi dengan proses analisis untuk mengaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan sejak data dikumpulkan dan berlangsung secara simultan. Namun, komponen inti dari analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana terdiri dari tiga tahap utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Keabsahan Data

Dalam menjamin kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Sebagaimana dikemukakan oleh William Wiersma (dalam Sugiyono, 2013), triangulasi merupakan prosedur verifikasi data melalui keberagaman sumber, metode, maupun waktu. Adapun jenis triangulasi yang diimplementasikan dalam riset ini meliputi:

1. Triangulasi sumber

Proses pengujian keabsahan dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda untuk memastikan konsistensi data.

2. Triangulasi Metode

Upaya validasi data dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang bervariasi (seperti menggabungkan wawancara dan observasi) guna mendapatkan informasi pada objek yang sama.

3. Triangulasi Waktu

Pemeriksaan keabsahan dilakukan melalui pengambilan atau pengecekan kembali data dalam kurun waktu dan situasi yang berbeda, sehingga stabilitas dan kebenaran informasi dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata Desa

a. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam membangun proses kolaborasi pada pengelolaan Kebun Wak Inggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Parerejo, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menjembatani potensi lokal desa dengan pasar pariwisata yang lebih luas. Peran tersebut diwujudkan dengan mempertemukan berbagai pihak yang terlibat, khususnya pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan wisata desa.

Dialog tatap muka dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi telah menjadi sarana utama dalam membangun komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dengan mempertemukan pengelola, kelompok masyarakat, dan unsur terkait melalui rapat koordinasi maupun diskusi langsung guna menyamakan persepsi terkait pengelolaan dan pengembangan wisata desa. Melalui forum-forum tersebut, para pihak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan masukan yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan bersama. Meskipun tingkat keterlibatan masyarakat belum merata, pelaksanaan dialog tatap muka menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan komunikasi yang terbuka sebagai dasar awal dalam proses kolaborasi pengelolaan Kebun Wak Inggi.

Dalam kerangka kerja *collaborative governance* yang diusung oleh Ansell dan Gash (2007), dialog tatap muka diposisikan sebagai komponen fundamental. Elemen ini berfungsi sebagai media utama bagi para aktor untuk menjalin komunikasi, melakukan negosiasi, serta merumuskan konsensus kolektif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, dialog telah terlaksana namun belum sepenuhnya inklusif, sehingga proses kolaborasi belum mencapai tingkat partisipasi yang ideal.

b. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan kerja sama pengelolaan Kebun Wak Inggi. Pemerintah desa berupaya membangun kepercayaan antar pihak dengan menetapkan kebijakan yang jelas serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Kepercayaan dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi terbangun melalui kebijakan pemerintah desa yang dinilai jelas dan dapat diterima oleh para pihak, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat melalui forum rapat yang mengedepankan musyawarah dan

kekeluargaan. Kepercayaan tersebut dirasakan oleh pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat sebagai faktor yang mendukung keberlangsungan kerja sama dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi.

Menurut Ansell dan Gash (2007), kepercayaan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan yang belum sepenuhnya setara antar aktor menunjukkan bahwa proses kolaborasi masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan dalam membangun hubungan yang lebih seimbang

c. Komitmen Proses

Komitmen pemerintah desa dalam mendukung kerja sama pengelolaan Kebun Wak Inggi diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan desa serta berpedoman pada peraturan desa, peraturan pemerintah daerah, dan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, komitmen dalam kerja sama pengelolaan Kebun Wak Inggi ditunjukkan melalui keterlibatan aktif pemerintah desa dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan desa serta ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, komitmen juga tampak dari upaya pemerintah desa dalam menjaga komunikasi dan memperjelas pembagian peran antar pihak yang terlibat. Di sisi lain, pengelola menunjukkan kesediaan untuk menjalankan pengelolaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, sementara masyarakat menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi apabila diperlukan. Namun demikian, keberlangsungan komitmen kerja sama tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah tantangan yang memerlukan pengelolaan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Ansell dan Gash, komitmen terhadap proses menjadi indikator penting keberlanjutan kolaborasi. Ketimpangan komitmen yang terjadi menunjukkan bahwa kolaborasi belum sepenuhnya kuat dan berkelanjutan karena belum didukung oleh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

d. Pemahaman Bersama

Pemahaman antar pihak menjadi faktor kunci dalam menyelaraskan tujuan pengelolaan Kebun Wak Inggi. Pemerintah desa berupaya menyamakan tujuan dan pemahaman melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Kepala Desa Parerejo menyampaikan bahwa:

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemahaman bersama mengenai tujuan pengelolaan Kebun Wak Inggi telah terbentuk melalui proses komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola kebun. Kesamaan pemahaman tersebut tercermin dari kejelasan tujuan pengelolaan, yaitu pengembangan potensi wisata desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perbedaan pandangan yang muncul di antara para pihak dapat diselesaikan melalui forum diskusi dan musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Di tingkat masyarakat, Kebun Wak Inggi dipahami sebagai sarana pemberdayaan ekonomi desa yang memberikan manfaat bagi warga, meskipun pemahaman tersebut lebih berfokus pada aspek manfaat dibandingkan dengan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan, namun implementasinya masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.

Berdasarkan teori Ansell dan Gash (2007), pemahaman bersama diperlukan untuk menyatukan visi dan tujuan kolaborasi. Ketidakmerataan pemahaman menunjukkan bahwa proses internalisasi tujuan kolaborasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh aktor memiliki arah yang serupa.

e. Dampak Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Dampak sementara dari proses kolaborasi pengelolaan Kebun Wak Inggi terlihat dari adanya perubahan sikap para pihak, terbentuknya pondasi operasional, serta terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, proses kolaborasi dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi telah menimbulkan sejumlah dampak awal bagi pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat. Dampak tersebut terlihat adanya perubahan pola kerja yang lebih terarah, kejelasan pembagian tugas, serta terciptanya hubungan kerja yang relatif harmonis antar pihak yang terlibat.

Selain itu, keberadaan Kebun Wak Inggi turut memberikan dampak positif bagi Desa Parerejo, khususnya dalam meningkatkan pengenalan desa oleh masyarakat luar serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat menilai bahwa dampak yang dirasakan masih bersifat terbatas dan belum optimal, terutama dari sisi pengelolaan, promosi, serta manfaat ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak kolaborasi masih berada pada tahap awal serta membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat desa.

Merujuk pada teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2007), *intermediate outcomes* merupakan indikator awal keberhasilan kolaborasi. Hasil yang belum optimal menunjukkan bahwa proses kolaborasi masih memerlukan penguatan agar dapat mencapai hasil yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Kebun Wak Inggi Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama berasal dari daya tarik dan keunikan potensi alam serta budaya yang dimiliki oleh Desa Parerejo. Potensi tersebut menjadi modal dasar dalam pengembangan wisata desa karena memiliki nilai jual dan daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, aspek aksesibilitas menuju lokasi wisata, ketersediaan akomodasi, serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada turut menunjang keberlangsungan pengelolaan Kebun Wak Inggi. Dukungan organisasi turut berperan menjadi aspek utama guna mendukung pengelolaan wisata desa.

Sinergi antara pemerintah desa, pengelola, dan kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, Pokdarwis, dan PKK menjadi kekuatan utama dalam mendukung keberlangsungan pengelolaan wisata desa. Dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut, Kebun Wak Inggi memiliki peluang besar untuk terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi masyarakat Desa Parerejo.

b. Faktor Penghambat

Pengelolaan Kebun Wak Inggi masih mengalami berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, pendanaan, manajemen, serta promosi. Hambatan tersebut dirasakan baik pada tataran kebijakan maupun pada pelaksanaan di lapangan. Meskipun demikian, pemerintah desa dan pihak pengelola telah berupaya mengatasi kendala tersebut melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta pelibatan pihak-pihak yang lebih kompeten. Sinergi antara pemerintah desa dan pengelola kebun ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan Kebun Wak Inggi secara berkelanjutan dan mendorong pengembangannya sebagai potensi unggulan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan kebun desa di Desa Wisata Kebun Wak Inggi telah melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah desa, pokdarwis, karang taruna, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut ditunjukkan melalui adanya komunikasi dan pembagian peran dalam pengelolaan destinasi wisata.

Namun proses kolaborasi tersebut belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antar pihak yang belum maksimal.

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan dukungan sumber daya guna mendukung pengembangan pariwisata desa secara berkelanjutan.

Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Parerejo, disarankan untuk memperkuat mekanisme kolaborasi melalui pembentukan forum kolaboratif yang lebih terstruktur dan inklusif, sehingga dialog antar aktor tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga deliberatif. Selain itu, pelembagaan kepercayaan melalui kesepakatan tertulis atau regulasi desa dapat menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi, terutama dalam menghadapi perubahan kepemimpinan desa.
2. Bagi Pengelola Kebun Wak Inggi, disarankan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan inovasi pengelolaan, khususnya dalam aspek promosi wisata dan pengembangan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara lebih luas. Pengelola juga perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan kebun dapat merata.
3. Bagi Masyarakat Desa Parerejo, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi, bukan sekadar penerima manfaat, melainkan juga berperan sebagai proses kolaborasi yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat secara aktif dapat memperkuat legitimasi dan keberhasilan pengelolaan wisata desa.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk mengkaji proses *collaborative governance* pada pengelolaan wisata desa dengan cakupan waktu yang lebih panjang atau dengan membandingkan beberapa desa, sehingga memberikan tinjauan yang lebih menyeluruh tentang variabel yang melatarbelakangi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi di tingkat desa.

Daftar Pustaka **Jurnal Artikel**

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Husna, N. U., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA LIMA PULUH KOTA. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 9, 63–76.
- Mufti, A. A., Anadza, H., & Sekarsari, R. W. (2023). EVALUASI COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAH DESA TUMPANG (Studi Pada Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Batik Selo Putri Dalam Program One Village One Product). *Jurnal Respon Publik*, 17(8), 80–91.
- Ode, L., & Islamy, S. (2022). PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE COLLABORATIVE GOVERNANCE PROCESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(April).
- Rochmatin, L., Muchsin, S., & Sunariyanto. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA WISATA KERTOSARI. *Kebijakan:Jurnal Ilmu Administrasi*, 16.
- Silviana, A., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2022). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT TANI DI DESA NAJARSARI KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG. *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 28–35.
- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul* .
- Yudanto, A. A., Solikin, A., & Windani, I. (2024). Collaborative Governance to achieve Village SDGs : A Case Study of Irrigation Systems in Krandegan Village. *INOBI: Jurnal Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 07(1), 535–550.

Buku

- Terry, George R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik* (M. R. Firdaus & F. Z. Yopiannor (ed.); Cetakan Pe). BILDUNG. www.penerbitbildung.com
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *PEMERINTAHAN DESA* (Y. Munaf (ed.)). NUSA MEDIA Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D* (Cetakan ke). ALFABETA, CV.

Regulasi

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa*.
- Kementerian Desa PDTT. (2021). *Laporan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*.

Dokumen

- Pemerintah Desa Parerejo. (2024). *Profil Desa Parerejo dan Dokumen Perencanaan Kebun Wak Inggi*. Parerejo.com.